

S
352.135 209 178 107

H.er

p

C 050501

2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA



SKRIPSI

**Penilaian Terhadap efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
dalam Meningkatkan Penerimaan daerah kota Palembang**



k. 12091
Rg. 12373

**Diajukan oleh
Eva Herdalina
01003130076**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2005**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

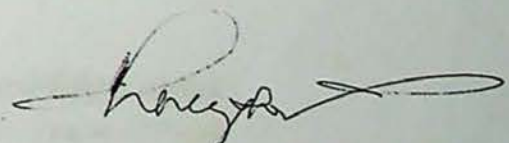
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : EVA HERDALINA P
Nomor Induk Mahasiswa : 01003130076
Jurusan : AKUNTANSI
Mata Kuliah Pokok : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : Penilaian Terhadap Efektivitas Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Dalam
Meningkatkan Penerimaan Daerah Kota
Palembang.

Pembimbing Skripsi :

Tanggal : 31 Januari 2005

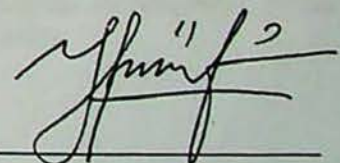
Ketua :



Drs. Charles Panggabean

Tanggal : 31 Januari 2005

Anggota :



Ahmad Subeki SE, Ak

Motto:

"Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan! Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dengan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah"

(Jeremia 17: 7-8)

Kupersembahkan untuk :

- ✕ Tuhan Yesus Kristus,
Juruselamatku dan Pengharapanku.
- ✕ Mami dan adik-adikku terkasih
(Yani, Endang, Tamiz, Nuel, Nita).
- ✕ Almamaterku.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini penulis bersyukur teristimewa kepada Tuhan Yesus Kristus Juruselamatku dan Pengharapanku. Penulis juga berterima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Zainal Ridho Djafar, selaku Rektor Universitas Sriwijaya,
2. Ibu Dra. Badia Perizade, M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya,
3. Ibu Dra. Rina Tjandrakirana, MM, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya, sekaligus Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak Aspahani, S.E., Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya,
5. Bapak Drs. Charles Panggabean, Ak, selaku Ketua Panitia Pembimbing Skripsi. Terima kasih pak, atas bimbingan dan nasehat-nasehatnya, Tuhan Yesus Memberkati Bapak.
6. Bapak Ahmad Subeki, S.E., Ak, selaku Anggota Panitia Pembimbing Skripsi. Terima kasih pak atas waktu dan ilmu yang diberikan.
7. Bapak Drs. Tamzil Djunaidi, Ak, selaku Anggota Panitia Penguji.
8. Yuk Aliya, "Makasih yuk atas bantuan dan kesabarannya, masih suka Bika Ambon, khan"
9. Bapak/Ibu dosen, Karyawan-karyawan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya,
10. Bapak/Ibu pegawai DISPENDA kota Palembang, yang telah membantu dalam pengambilan data yang diperlukan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mendukung penulis yang ku kasihi dalam Jesus Christ :

- ♥ Mami tersayang, Makasih atas dukungannya dalam segala sesuatu, semoga suatu hari nanti aku bisa memberi yang terbaik untuk mami, dukung doa aku terus ya mi, I Love You Mom and GOD BLESS YOU forever and ever,
- ♥ Adik-adik ku yang maniez (Yani, Endang, Tamie, Nuel, Nita), thanks yach udah jadi adik-adikku yang paling baik. Yan, thanks atas dukungan dananya, tunggu aja! aku pasti traktirin U and Mas Nuel, makasih yach atas nasehatnya, BTW mau dibeliin apa? mobil yach ? .
- ♥ B' Jhon Wane dan B' Robert, penatua yang kuhormati dalam Kristus Yesus, makasih Bang atas dukungan doanya dan nilai-nilai hidup yang boleh kubagikan. Juga untuk K'Leny dan C'Ellis, GOD BLESS YOU,
- ♥ Sahabat-sahabatku yang kukenal di kota Palembang, and Thanks God They are so great. K'Uwi, thanks yach untuk waktu yang kita habiskan bersama (There is no useless time), thanks juga udah edit skripsiku, especially for your pray. Numpaaang lewat nich! thank untuk K'Risma & K'Ria atas perhatiannya. Duma sayang, my best friend, U pasti bisa nyelesain segala sesuatu yang Tuhan percayakan padamu, Tetap kuat dalam melayani Tuhan (ATS.....Halleluya) and yang pasti segera nyusul yach. B'Andi (he...he...he...ternyata dikau pria yang sabar, SALUT.....SALUTT Ψ) kapan yach acara berantem yang paling seru??
- ♥ Sahabat-sahabatku di pelayanan SION dengan visi yang luar biasa"Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak" I LOVE YOU ALL..
- ♥ K'Ida dan K'Luker, Ibu-Ibu PA yang berjaga-jaga atas hidupku, GOD BLESS YOU, semoga kakak-kakakku tersayang mendapatkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kalian,
- ♥ My favorite KOMSEL "Daniel" Tetap jadi saluran berkat ALLAH yach!!
- ♥ Anak-anak PA ku, Helena dan Ivana, Makasih yach Van atas bantuanmu dalam pengerjaan skripsi, I LOVE both of U,
- ♥ B'Chandra, Walaupun belum pernah ketemu you've ever been my miracle selama pengerjaan skripsi,
- ♥ Finally, untuk sahabat-sahabatku yang banyak mendukungku (Melani, Niar, Riris).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis naikkan kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang melimpah dan atas kebaikan-Nya yang tak habis-habisnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penilaian Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah Kota Palembang”

Adapun maksud dari disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar sarjana ekonomi.

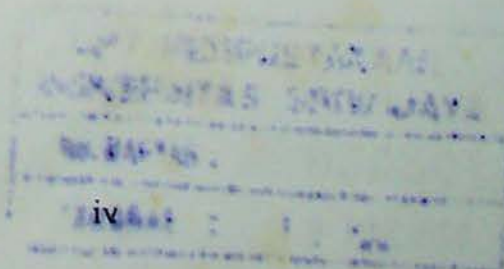
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan lebih lanjut skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan untuk pengkajian lebih lanjut.

Palembang, Maret 2005

Penulis,

Eva Herdalina P



DAFTAR ISI

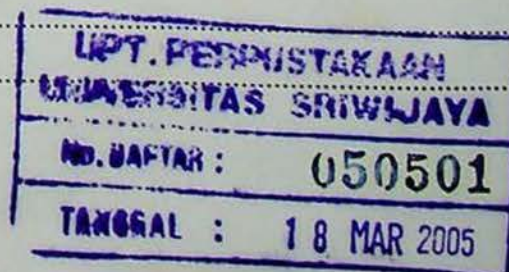
	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Pemikiran.....	7
1.6. Metodologi Penelitian	
1.6.1. Objek Penelitian.....	9
1.6.2. Metodologi Pengumpulan Data.....	9
1.6.3. Teknik Analisa Data.....	10
1.7. Sistematika Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak.....	13
2.2. Pembagian Pajak.....	15



2.3. Fungsi Pajak.....	18
2.4. Syarat, Asas, Stelsel, Sistem Pemungutan Pajak.....	18
2.4.1. Syarat Pemungutan Pajak.....	18
2.4.2. Asas-asas Pemungutan Pajak.....	19
2.4.3. Stelsel Pemungutan Pajak.....	20
2.4.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	21
2.5. Pengertian Efektivitas.....	22
2.6. Defenisi Penerimaan.....	23
2.7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	23
2.7.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	23
2.7.2. Sejarah Singkat Pajak Bumi dan Bangunan.....	24
2.7.3. Faktor-faktor yang Mendorong Lahirnya Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
2.7.4. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan.....	26
2.7.5. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	26
2.7.6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
2.7.7. Sektor-sektor Pajak Bumi dan Bangunan.....	30
2.7.8. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan.....	31
2.7.9. Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan PBB.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

3.1. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	33
3.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	34
3.2.1. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah.....	34
3.2.2. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah.....	35

3.2.3. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah	36
3.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah.....	38
3.4. Keadaan Pegawai	46
3.5. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	47
3.6. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB	
Tahun anggaran 1999-2003.....	54
3.6.1. Daftar Target dan Realisasi PBB Sektor Perkotaan	
Seluruh Kecamatan di Palembang Tahun Anggaran 1999-2003 .	55
3.6.2. Daftar Ketetapan dan Realisasi Wajib Pajak	
Tahun Anggaran 1999-2003	56
3.6.3. Daftar target dan realisasi penerimaan PBB	
Sektor perkotaan Tahun Anggaran 1999-2003	57
3.6.4. Daftar Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 1999-2003	57

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Struktur Organisasi.....	57
4.2. Kemampuan Aparatur	61
4.3. Pengawasan	65
4.3.1. Pengawasan Langsung	65
4.3.2. Pengawasan Tidak langsung	67
4.4. Sarana dan Fasilitas Kerja.....	68
4.5. Pelaksanaan Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	70
4.5.1. Pendataan	70
4.5.2. Penetapan	73
4.5.3. Penagihan/ Pemungutan	74
4.5.4. Biaya Operasional	77
4.5.5. Waktu Pelaksanaan	78
4.5.6. Pelaporan dan Evaluasi	78

4.6. Target dan Realisasi Penerimaan PBB.....	80
4.6.1. Analisa Perbandingan antara Target dan Realisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan di Seluruh Kecamatan Kota Palembang Tahun Anggaran 1999-2003.....	80
4.6.2. Analisa target dan Realisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan Kota Palembang Tahun Anggaran 1999-2003	80
4.6.3. Analisa Kontribusi PBB PT. Pusri, Tbk Terhadap Kota Palembang.....	89
4.6.4. Analisa Kontribusi PBB Sektor Perkotaan Terhadap Penerimaan Daerah.....	90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	93
5.2. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA.....	viii
----------------------------	-------------

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 3.6.1	Daftar Target dan Realisasi Sektor Perkotaan Seluruh Kecamatan di Palembang Tahun Anggaran 1999-2003	55
Tabel 3.6.2	Daftar Target dan Realisasi Wajib Pajak Tahun Anggaran 1999-2003	56
Tabel 3.6.3	Target dan Realisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan Tahun Anggaran 1999-2003	57
Tabel 3.6.4	Daftar Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 1999-2003	57
Tabel 4.1	Jumlah Pegawai Pengelola PBB	59
Tabel 4.2	Kegiatan Penyampaian SPOP di Palembang	61
Tabel 4.3	Jumlah Pegawai dispenda Bagian Pengelolaan PBB	62
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan Pegawai Pengelola PBB	64
Tabel 4.5	Sarana dan Fasilitas Kerja Dinas Pendapatan Daerah	70
Tabel 4.6	Kegiatan Penyampaian SPOP	72
Tabel 4.7	Kegiatan Penyampaian SPPT	74
Tabel 4.8	Kegiatan Penagihan dan Pembayaran	80
Tabel 4.9	Daftar Target dan Realisasi PBB Tahun Anggaran 1999-2000	82
Tabel 4.10	Daftar Persentase Realisasi Penerimaan di Seluruh Kecamatan Kota Palembang	86
Tabel 4.11	Target dan Realisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan Tahun Anggaran 1999-2003	87
Tabel 4.12	Daftar Target dan Realisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan Keseluruhan (Kecamatan dan PT Pusri,Tbk)	89
Tabel 4.13	Kontribusi PBB PT Pusri,Tbk Terhadap Total Penerimaan PBB	90
Tabel 4.14	Kontribusi PBB Sektor Perkotaan Terhadap Penerimaan daerah Palembang	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami Indonesia telah mengakibatkan munculnya dampak negatif dalam perekonomian Indonesia. Beberapa dampak negatif dari krisis ini telah menyebabkan nilai rupiah yang semakin merosot, inflasi yang semakin tinggi, meningkatnya suku bunga perbankan, tingkat pertumbuhan ekonomi yang minus dan jumlah pengangguran yang semakin bertambah.

Di satu sisi, pembangunan nasional meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pembangunan di segala bidang khususnya pembangunan di sektor perekonomian.

Suatu pembangunan ekonomi akan dapat dilaksanakan apabila tersedia dana yang cukup. berdasarkan sumber penerimaan negara, dana pembangunan berasal dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri terbesar berasal dari sektor migas, namun harga migas di pasaran dunia yang selalu berfluktuasi dan cadangan sektor migas yang semakin menipis menyebabkan penerimaan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengalami penurunan yang cukup berarti. Sedangkan penerimaan luar negeri berupa bantuan maupun pinjaman luar negeri hanya dipandang oleh pemerintah sebagai

pendukung pembangunan ekonomi saja. Kondisi ini mendorong pemerintah mulai memperhatikan sumber penerimaan dari sektor non migas yaitu sektor perpajakan.

Sektor perpajakan merupakan pilihan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri karena sektor ini relatif lebih stabil terhadap pertumbuhan kondisi perekonomian. Sangat strategisnya peranan pajak sebagai sumber penerimaan mendorong pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dari 12,6% dari PDB dalam APBN tahun anggaran 2001 menjadi 16 % dari PDB pada tahun anggaran 2004. Di samping itu pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan nasional.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999. Penyelenggara otonomi daerah ini diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Semuanya itu dilaksanakan atas dasar 3 hal yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan terutama yang menyangkut sumber pembiayaan pemerintah daerah.

Suatu rencana finansial atau anggaran akan disusun oleh pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD sebagai acuan. Jadi di daerah otonom, APBD akan berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian dan alat kebijakan fiskal dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Daerah yang sedang melaksanakan pembangunan tentu menggali sumber – sumber penerimaan daerah. Menurut pasal 3 UU No 25 / 1999 sumber – sumber penerimaan daerah adalah :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain – lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan terdiri dari PBB, BPHTB, DAU, DAK
3. Pinjaman daerah

Salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Bumi dan / atau bangunan dianggap telah memberikan keuntungan dan kedudukan sosial yang lebih baik bagi orang yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. oleh karena itu wajar apabila subjek pajak diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat kenikmatan yang diperolehnya melalui pembayaran PBB.

Pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah indonesia. Sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak PBB adalah tarif tunggal, yaitu 0,5 % dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). PBB mulai diberlakukan tanggal 1 januari 1986 berdasarkan UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah UU

No. 12 tahun 1994. berdasarkan kewenangannya, PBB termasuk dalam golongan pajak negara atau pajak pusat. Artinya wewenang pemungutan pajak tersebut ada di tangan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya, kantor pusat hanya memberikan kebijakan melalui instansi tertentu di daerah yang akan memungut berdasarkan peralatan yang dimiliki dan ditunjang sumber daya manusia yang ada.

Hasil penerimaan PBB tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat sebagai penerimaan daerah. Berdasarkan pasal 6 UU No .25/1999, penerimaan negara yang berasal dari PBB dibagi dengan perincian 10 % untuk pusat dan 90 % untuk daerah. Dari perincian tersebut maka jelas terlihat bahwa penerimaan yang berasal dari PBB memberikan pemasukan yang sangat berarti bagi daerah yang bersangkutan dalam hal ini Kota Palembang. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah terbesar, DISPENDA Kota Palembang yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai instansi yang memungut PBB perlu menilai sejauh mana pencapaian target hasil pemungutan PBB dibandingkan dengan realisasi pemungutan PBB di lapangan.

Menyadari besarnya kontribusi PBB sebagai sumber penerimaan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas prosedur pemungutan PBB dalam meningkatkan penerimaan daerah. PBB terdiri dari beberapa sektor yaitu : sektor perkotaan, sektor pedesaan, sektor perkebunan, sektor pertambangan dan sektor kehutanan penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai sektor perkotaan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul, ” **Penilaian Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Penerimaan Daerah Kota Palembang**”.

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas meliputi :

1. Bagaimanakah efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan daerah kota Palembang ?
2. Apa kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota Palembang ?
3. Bagaimanakah kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan daerah kota Palembang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan daerah Kota Palembang
2. Untuk mengetahui langkah – langkah apa yang dapat ditempuh dalam mengatasi kendala – kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

2. Bagi instansi

- Sebagai masukan terhadap pemerintah daerah sejauh mana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yang telah diterapkan selama ini.
- Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang relevan dengan usaha – usaha peningkatan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan.

3. Bagi akademik

Sebagai karya tulis yang dapat menambah referensi yang ada dan juga sebagai bahan perbandingan bagi mereka yang memerlukan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang – undang dan peraturan – peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak dikalangan para sarjana ahli di bidang perpajakan. Diantara pendapat para ahli adalah :

1. Menurut Prof Dr. PJA Andriani , pajak adalah iuran bagi negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan.
2. Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.
3. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths, pajak adalah prestasi pemerintahan yang terutang melalui norma – norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.
4. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pajak adalah iuran wajib, berupa ang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹

Dari beberapa defenisi diatas dapat dilihat beberapa hal yang menjadi ciri pajak yaitu:

1. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.

¹ H. Bohari, S.H, MS, Pengantar Hukum Pajak, Edisi I, Cet.3, Jakarta, 1999, Hal 19-21

2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan.
3. Perpindahan ini adalah berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
4. Tidak ada jasa yang timbul yang dapat ditunjuk artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1986, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah UU No. 12 Tahun 1994. Beberapa UU dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun.1985 sebagaimana halnya telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994.
2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1985 tentang persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) pada PBB
3. Keputusan MenKeu No. 1002/KMK.04/1985 tentang tata cara pendaftaran objek PBB
4. Keputusan MenKeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB

5. Keputusan MenKeu No. 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksaan.
6. Keputusan MenKeu No. 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat II
7. Keputusan KDKI Jakarta No. 816 Thn. 1989 tentang petunjuk pelaksanaan Pemungutan PBB di wilayah DKI Jakarta.²

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Palembang, untuk memperoleh data mengenai struktur organisasi dan pembagian tugas; kepegawaian, sarana dan fasilitas kerja; pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan PBB; jumlah objek pajak dan subjek pajak; target dan realisasi penerimaan pajak PBB tahun 1999-2003.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui:

1. Studi Pustaka

Ditujukan untuk memperoleh landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian landasan teori ini diperoleh melalui literatur-literatur, majalah-

² Rimsky K. Judisseno, Pajak dan Strategi Bisnis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997 hal 350 - 351

majalah ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Dilakukan dengan menelusuri dokumentasi-dokumentasi yang ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti. Data juga diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang akan dipakai yaitu teknik analisa deskriptif kualitatif dengan mencatat, menuturkan, mengklasifikasikan dan menganalisa data, informasi yang ada mengenai kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian data yang ada akan diolah menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang ada. Untuk menghitung seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan daerah dapat digunakan rumus kontribusi.

Cara menghitung kontribusi dengan menggunakan rumus :

$$K = \frac{Xi}{Ji} \times 100\%$$

K = Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Xi = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Ji = Penerimaan Daerah

Dari penelitian tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dan memberikan saran bagi instansi tersebut.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah untuk mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan,

BAB II : Landasan Teori

Dalam Bab ini dijelaskan tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini antara lain pengertian pajak, teori-teori pemungutan pajak, fungsi pemungutan pajak, dasar hukum pemungutan pajak, sejarah singkat PBB, subjek dan objek PBB, sifat PBB, pelaksanaan pemungutan PBB, pembagian hasil PBB antara pemerintah pusat daerah tingkat I dan daerah tingkat II

BAB III : Gambaran Umum Instansi

Dalam Bab ini dijelaskan sejarah berdirinya DISPENDA, ruang lingkup, struktur organisasi dan pembagian tugas, sarana dan fasilitas yang dimiliki.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini merupakan analisis dan pembahasan yang akan membahas komponen-komponen yang termasuk dalam penilaian efektivitas terhadap sistem dan prosedur pemungutan PBB, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan PBB, dan evaluasi kontribusi PBB terhadap penerimaan daerah Kota Palembang.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amachi Chaerul Tubagus. *Perpajakan*. Jakarta: PAU-UI, PT Gramedia Pustaka
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: FE Universitas Gajah Mada, November 2001.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Dirjen Pajak. *Panduan Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan 1999
- Gunadi. *Perpajakan Edisi revisi I*. Jakarta: Penerbit FE UI, Januari 1999.
- Hadi, Moeljo. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Mei 2001.
- Judisseno Rimsky. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 1992.
- *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mulyadi. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat, Juni 2001.
- Poerdawarminta. J.W.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soemitro, Rochmat. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: PT Eresco, 1989.
- Pemerintah Kota Palembang. *Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan PBB Sektor Perkotaan*. 2003
- Toha, Miftah. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: CV Rajawali, 1988.
- UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994 tentang PBB.